
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA MADIUN

RINGKASAN

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa LKPD Tahun 2017 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

LKPD Tahun 2017 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

LKPD ini disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Laporan keuangan BUMD dan pihak-pihak terkait lain yang mengelola dan atau menguasai aset pemerintah daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi (LRA) menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 dengan realisasinya meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang perhitungan anggaran.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pendapatan	940.781.952.000,00	957.624.973.325,14	101,79%	998.282.330.537,80
PAD	192.013.251.000,00	230.608.717.369,14	120,10%	173.235.929.827,80
Transfer	748.051.851.000,00	726.299.405.956,00	97,09%	823.375.770.710,00
Lain-lain pendapatan yang sah	716.850.000,00	716.850.000,00	100,00%	1.670.630.000,00
Belanja	1.246.639.438.594,13	954.991.703.029,81	76,61%	1.031.564.193.296,44
Operasi	843.185.965.000,00	699.013.726.516,58	82,90%	785.169.488.575,44
Modal	280.766.389.000,00	255.977.976.513,23	91,17%	246.394.704.721,00
Belanja tak terduga	122.687.084.594,13	0,00	0,00%	0,00
Surplus (defisit)	(305.857.486.594,13)	2.633.270.295,33		(33.281.862.758,64)
Pembiayaan netto	305.857.486.594,13	305.857.486.594,13	100,00%	339.139.349.352,77
	SILPA tahun berjalan	308.490.756.889,46		305.857.486.594,13

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan SAL awal, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sehingga menghasilkan saldo akhir SAL.

Perbandingan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
--------	------------------	------------------

SAL Awal 1 Januari	305.857.486.594,13	339.135.179.352,77
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(305.857.486.594,13)	(339.135.179.352,77)
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan	308.490.756.889,46	305.857.486.594,13
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00
SAL Akhir	308.490.756.889,46	305.857.486.594,13

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2017. Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Aset Lancar	364.592.855.334,30	358.332.225.827,02
Investasi	143.177.019.700,89	145.062.240.037,43
Aset Tetap	1.791.556.948.946,70	1.821.997.338.661,75
Aset Lainnya	99.086.047.699,06	58.470.507.196,17
JUMLAH ASET	2.398.412.871.680,95	2.383.862.311.722,37
Utang Lancar	10.569.398.509,44	32.540.925.644,25
Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Ekuitas	2.387.843.473.171,51	2.351.321.386.078,12
JUMLAH UTANG DAN EKUITAS	2.398.412.871.680,95	2.383.862.311.722,37

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4 = (2 - 3)	5 = (4/3)
Pendapatan Operasional				
Pendapatan LO	978.291.790.329,31	1.055.306.846.311,07	(77.118.303.924,94)	7,31%
PAD LO	250.007.024.927,89	188.772.516.968,07	61.201.837.261,73	132,42%
Transfer LO	726.839.358.425,00	828.331.190.822,00	101.491.832.397,00	(69,34%)
Lain-lain pendapatan yang sah LO	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(36.828.308.789,67)	(46,91%)
Beban	814.916.294.444,63	908.348.844.872,51	(96.216.555.716,93)*	(10,59%)
Beban operasi	814.916.294.444,63	908.348.844.872,51	(96.216.555.716,93)*	(10,59%)
Surplus (defisit) operasional	168.820.983.726,68	146.958.001.438,56	19.098.251.791,99	13,00%
Surplus (Defisit) Non Operasional				
Surplus non ops	0,00	0,00	0,00	0,00%
Defisit non ops	0,00	0,00	0,00	0,00%
Surplus (defisit) non operasional	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pos Luar Biasa				
Pendapatan luar biasa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban luar biasa	94.394.266.663,99	0,00	0,00	0,00%
Beban tdk terduga	0,00	0,00	0,00	0,00%
Surplus (defisit) luar biasa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Surplus (defisit) LO	68.981.227.220,69	146.958.001.438,56	24.067.032.259,11	16,35% 1

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Perbandingan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus kas masuk	957.119.939.199,14	998.239.570.537,80
Arus kas keluar	699.013.726.516,58	785.169.488.575,44
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	258.106.212.682,56	213.070.081.962,36
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus kas masuk	505.034.126,00	42.760.000,00
Arus kas keluar	255.977.976.513,23	246.394.704.721,00
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(255.472.942.387,23)	(246.351.944.721,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus kas masuk	0,00	4.170.000,00
Arus kas keluar	0,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00	4.170.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus kas masuk	37.091.114.404,26	25.938.063.146,55
Arus kas keluar	37.091.114.404,26	25.938.063.146,55
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	0,00	0,00
Kenaikan (penurunan) kas bersih selama periode	2.633.270.295,33	(33.277.692.758,64)
Saldo awal kas di kas daerah	275.264.586.878,92	313.127.408.261,28
Saldo awal kas BLUD Dinas Kesehatan	2.536.318.146,84	2.011.116.501,81
Saldo awal kas BLUD RSUD	28.036.186.781,37	23.996.654.589,68
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	3.406.500,00	0,00

Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	16.988.287,00	0,00
SALDO AKHIR KAS DI KAS DAERAH	308.490.756.889,46	305.857.486.594,13

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan ekuitas akhir.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas awal	2.351.321.386.078,12	1.783.390.753.070,32
Surplus (Defisit) LO	68.981.227.220,69	146.958.001.438,56
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sd 2017	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi sd 2017	0,00	0,00
Lain-Lain	(32.459.140.127,30)	420.972.631.569,24
Ekuitas akhir	2.387.843.473.171,51	2.351.321.386.078,12

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga menyajikan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga mengungkapkan pula kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang dikeluarkan.

PEMERINTAH KOTA MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

No	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2017	%	2016
1	PENDAPATAN	5.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.				
3	Hasil Pajak Daerah	5.1.1.1.	58.000.000.000,00	75.224.831.585,44	129,70%	64.045.559.079,36
4	Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.2.	15.963.010.000,00	18.407.218.016,50	115,31%	16.762.538.293,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.3.	12.093.398.000,00	13.320.249.415,39	110,14%	11.172.031.994,51
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.4.	105.956.843.000,00	123.656.418.351,81	116,70%	81.255.800.460,93
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 sd 6)		192.013.251.000,00	230.608.717.369,14	120,10%	173.235.929.827,80
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
10	DANA PERIMBANGAN	5.1.2.1				
11	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1	33.286.390.000,00	27.325.331.947,00	82,09%	34.049.572.850,00
12	Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.2.1.2	31.546.262.000,00	18.680.122.868,00	59,22%	18.880.139.043,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3	502.392.070.000,00	502.392.070.000,00	100,00%	511.375.289.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.4	99.154.318.000,00	77.267.422.860,00	77,93%	140.847.099.356,00
15	Dana Bagi Hasil Cukai	5.1.2.1.5	13.524.401.000,00	13.308.934.159,00	98,41%	12.409.333.957,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 sd 15)		679.903.441.000,00	638.973.881.834,00	93,98%	717.561.434.206,00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	5.1.2.2				
18	Dana Otonomi Khusus	5.1.2.2.1				
19	Dana Penyesuaian	5.1.2.2.2	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%	41.382.622.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (18 sd 19)		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%	41.382.622.000,00
21	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.2.3				
22	Pendapatan bagi hasil pajak	5.1.2.3.1	60.648.410.000,00	79.825.524.122,00	131,62%	64.431.714.504,00
23	Pendapatan bagi hasil lainnya	5.1.2.3.2				
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 sd 24)		60.648.410.000,00	79.825.524.122,00	131,62%	64.431.714.504,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 20 + 24)		748.051.851.000,00	726.299.405.956,00	97,09%	823.375.770.710,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3.				
27	Pendapatan Hibah	5.1.3.1.				
28	Pendapatan Darurat					
29	Pendapatan Lainnya					
30	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	5.1.3.2.	716.850.000,00	716.850.000,00	100,00%	1.670.630.000,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 sd 30)		716.850.000,00	716.850.000,00	100,00%	1.670.630.000,00
32	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 25 + 31)		940.781.952.000,00	957.624.973.325,14	101,79%	998.282.330.537,80
33						
34	BELANJA	5.2				
35	BELANJA OPERASI	5.2.1				

No	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2017	%	2016
36	Belanja Pegawai	5.2.1.1.	473.918.184.690,00	391.631.558.502,00	82,64%	511.243.214.266,00
37	Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2.	335.424.479.310,00	280.472.821.815,27	83,62%	257.954.754.292,44
38	Belanja Bunga					
39	Belanja Subsidi					
40	Belanja Hibah	5.2.1.3.	13.686.596.000,00	11.924.689.389,31	87,13%	7.013.671.600,00
41	Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.4.	20.156.705.000,00	14.984.656.810,00	74,34%	8.957.848.417,00
42	Jumlah Belanja Operasi (36 sd 41)		843.185.965.000,00	699.013.726.516,58	82,90%	785.169.488.575,44
43	BELANJA MODAL	5.2.2				
44	Belanja Modal Tanah	5.2.2.1				
45	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.2.2.2	109.296.730.000,00	103.557.504.743,48	94,75%	62.160.897.084,00
46	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.2.2.3	48.284.754.000,00	43.416.541.452,75	89,92%	53.614.816.421,00
47	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	5.2.2.4	110.280.288.000,00	102.648.521.200,00	93,08%	127.909.902.613,00
48	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5	6.485.304.000,00	3.188.874.942,00	49,17%	463.668.600,00
49	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.2.6	6.419.313.000,00	3.166.534.175,00	49,33%	2.245.420.003,00
50	Jumlah Belanja Modal (44 sd 49)		280.766.389.000,00	255.977.976.513,23	91,17%	246.394.704.721,00
51	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.3				
52	Belanja Tidak Terduga	5.2.3.1	122.687.084.594,13		0,00%	
53	Jumlah Belanja Tak Terduga (52)		122.687.084.594,13		0,00%	
54	JUMLAH BELANJA (42 + 50 + 52)		1.246.639.438.594,13	954.991.703.029,81	76,61%	1.031.564.193.296,44
55						
56	SURPLUS/ DEFISIT (33 - 60)		(305.857.486.594,13)	2.633.270.295,33		(33.281.862.758,64)
57						
58	PEMBIAYAAN	5.3				
59	Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.3.1				
60	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.3.1.1	305.857.486.594,13	305.857.486.594,13	100,00%	339.135.179.352,77
61	Pencairan Dana Cadangan		-			
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-			
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.3.1.2	-			
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.3.1.3	-			4.170.000,00
65	Penerimaan Piutang Daerah		-			
66	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (60 sd 65)		305.857.486.594,13	305.857.486.594,13	100,00%	339.139.349.352,77
67	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.3.2				
68	Pembentukan Dana Cadangan					
69	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.3.2.1	-			
70	Pembayaran Pokok Utang	5.3.2.2				
71	Pemberian Pinjaman Daerah					
72	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (68 sd 71)		-			
73	Pembiayaan Netto (66 - 72)		305.857.486.594,13	305.857.486.594,13	100,00%	339.139.349.352,77
74	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (56 + 73)			308.490.756.889,46		305.857.486.594,13

WALIKOTA MADIUN

TTD

H.SUGENG RISMİYANTO,SH, M.Hum

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR : 36 TAHUN 2018
 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1				
2	ASET	7.1		
3	ASET LANCAR	7.1.1		
4	Kas dan Bank	7.1.1.1		
5	Kas di Kas Daerah	7.1.1.1.1	39.929.243.287,63	275.264.586.878,92
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.1.1.1.2		
7	Kas di Bendahara Penerimaan	7.1.1.1.3	41.690.025,00	20.394.787,00
8	Kas di BLUD RSUD	7.1.1.1.4	23.695.743.471,85	28.036.186.781,37
9	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	7.1.1.1.4	3.527.548.931,14	2.536.318.146,84
10	Kas Lainnya		1.296.531.173,84	2.672.067.089,70
11	Deposito Berjangka 1 Bulan		240.000.000.000,00	
12	Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	4.560.680.557,40	3.769.953.866,00
13	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	(497.747.971,75)	(336.786.290,21)
14	<i>Piutang Pajak Daerah Netto</i>	7.1.1.2	4.062.932.585,65	3.433.167.575,79
15	Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	2.409.952.554,00	1.504.679.991,00
16	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	(479.420.814,53)	(211.958.964,70)
17	<i>Piutang Retribusi Daerah Netto</i>	7.1.1.3	1.930.531.739,47	1.292.721.026,30
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	431.090.096,00	541.181.314,00
19	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	(215.545.048,00)	(270.590.657,00)
20	<i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>	7.1.1.4	215.545.048,00	270.590.657,00
21	Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	35.885.862.487,70	31.083.765.577,79
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	(403.444.851,88)	(447.703.140,87)
23	<i>Piutang Lain-Lain Netto</i>	7.1.1.5	35.482.417.635,82	30.636.062.436,92
24	Persediaan	7.1.1.6	11.908.197.507,47	12.648.252.970,18
25	Belanja Dibayar Dimuka	7.1.1.7	2.502.473.928,43	1.521.877.477,00
26	Jumlah Aset Lancar (5 sd 11 +13+16+19+22+23+24+25)		364.592.855.334,30	358.332.225.827,02
27				
28	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.1.2		
29	Investasi Non Permanen	7.1.2.1		
30	Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.1	22.535.722.180,36	21.282.514.160,06
31	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.2	(4.282.742.678,21)	(4.033.232.092,52)
32	<i>Investasi Dana Bergulir Netto</i>	7.1.2.1.2	18.252.979.502,15	17.249.282.067,54
33				
34	Jumlah Investasi Non Permanen (32)		18.252.979.502,15	17.249.282.067,54
35				
36	Investasi Permanen	7.1.2.2		
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.1.2.2.1	124.924.040.198,74	127.812.957.969,89
38	Jumlah Investasi Permanen (37)		124.924.040.198,74	127.812.957.969,89
39				
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34+38)		143.177.019.700,89	145.062.240.037,43
41				

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
42	ASET TETAP	7.1.3		
43	Tanah	7.1.3.1	706.768.917.129,00	746.929.754.829,00
44	Peralatan dan Mesin	7.1.3.2	425.595.976.323,50	392.197.738.239,97
45	Gedung dan Bangunan	7.1.3.3	647.411.660.877,03	715.435.055.660,95
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.1.3.4	800.578.583.757,05	705.169.609.291,00
47	Aset Tetap Lainnya	7.1.3.5	4.806.741.593,18	4.770.699.355,85
48	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.1.3.6	48.322.382.857,00	45.425.929.857,00
49	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(841.927.313.590,06)	(787.931.448.572,02)
50	Jumlah Aset Tetap (43 sd 49)		1.791.556.948.946,70	1.821.997.338.661,75
51				
52	ASET LAINNYA	7.1.4		
53	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
54	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
55	<i>Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>		-	-
56	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
57	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
58	<i>Tuntutan Perbendaharaan Netto</i>		-	-
59	Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	155.654.318,43	2.925.735.246,17
60	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	-	-
61	<i>Tuntutan Ganti Rugi Netto</i>	7.1.4.1	155.654.318,43	2.925.735.246,17
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.1.4.2	88.411.755.000,00	31.979.755.000,00
63	Aset Tak Berwujud	7.1.4.4	10.754.400.455,00	9.621.870.430,00
64	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.1.4.4	(8.986.382.169,34)	(6.948.708.544,00)
65	<i>Aset Tak Berwujud Netto</i>	7.1.4.4	1.768.018.285,66	2.673.161.886,00
66	Aset Lain-lain	7.1.4.5	23.096.004.799,04	20.891.855.064,00
67	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	7.1.4.5	(14.345.384.704,07)	-
68	<i>Akumulasi penyusutan aset lain-lain Netto</i>	7.1.4.5	8.750.620.094,97	-
69	Jumlah Aset Lainnya (53 sd 68)		99.086.047.699,06	58.470.507.196,17
70				
71	JUMLAH ASET (26 + 40 + 50 + 69)		2.398.412.871.680,95	2.383.862.311.722,37
72				
73	UTANG	7.2		
74	UTANG LANCAR	7.2.1		
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.2.1.1		
76	Pendapatan Diterima Dimuka		4.963.939.797,44	3.948.533.487,17
77	Utang Belanja	7.2.1.2	5.440.683.012,00	28.426.000.000,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.2.1.2	164.775.700,00	166.392.157,08
79	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (75 sd 78)		10.569.398.509,44	32.540.925.644,25
80				
81	UTANG JANGKA PANJANG	7.2.2		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 sd 87)		-	-

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
89				
90	JUMLAH KEWAJIBAN (79 +88)		10.569.398.509,44	32.540.925.644,25
91				
92	Ekuitas	7.3.1	2.387.843.473.171,51	2.351.321.386.078,12
93	Jumlah Ekuitas (91)		2.387.843.473.171,51	2.351.321.386.078,12
94				
95	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (90 + 93)		2.398.412.871.680,95	2.383.862.311.722,37

WALIKOTA MADIUN,

TTD

H. SUGENG RISMIYANTO

PEMERINTAH KOTA MADIUN
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	PENDAPATAN LO	8.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH LO	8.1.1				
3	Hasil Pajak Daerah LO	8.1.1.1	75.968.556.063,51	65.080.072.075,90	10.888.483.987,61	16,73%
4	Hasil Retribusi Daerah LO	8.1.1.2	18.731.242.668,40	18.066.580.676,00	664.661.992,40	3,68%
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	8.1.1.3	27.183.076.020,81	20.096.685.245,24	7.086.390.775,57	36,35%
6	Lain-lain PAD yang Sah	8.1.1.4	128.124.150.175,17	85.520.178.970,93	42.594.971.204,24	49,80%
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 sd 6)		250.007.024.927,89	188.772.516.968,07	61.234.507.959,82	32,55%
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER LO	8.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN LO	8.1.2.1				
11	Bagi Hasil Pajak LO	8.1.2.1.1	27.325.331.947,00	34.049.572.850,00	(6.724.240.903,00)	(19,75%)
12	Bagi Hasil Bukan Pajak LO	8.1.2.1.2	18.680.122.868,00	18.880.139.043,00	(200.016.175,00)	(1,06%)
13	Dana Alokasi Umum LO	8.1.2.1.3	502.392.070.000,00	511.375.289.000,00	(8.983.219.000,00)	(1,76%)
14	Dana Alokasi Khusus LO	8.1.2.1.4	77.267.422.860,00	140.847.099.356,00	(63.579.676.496,00)	(45,14%)
15	Dana Bagi Hasil Cukai LO	8.1.2.1.5	13.308.934.159,00	12.409.333.957,00	899.600.202,00	7,25%
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 sd 15)		638.973.881.834,00	717.561.434.206,00	(78.587.552.372,00)	-10,95%
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA LO	8.1.2.2				
19	Dana Otonomi Khusus LO	8.1.2.2.1	-	-		
20	Dana Penyesuaian LO	8.1.2.2.2	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00	(33.882.622.000,00)	(81,88%)
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 sd 20)		7.500.000.000,00	41.382.622.000,00	(33.882.622.000,00)	(81,88%)
22						
23	Transfer Pemerintah Provinsi LO	8.1.2.3				
24	Pendapatan bagi hasil pajak LO	8.1.2.3.1	79.648.626.591,00	67.716.504.616,00	11.932.121.975,00	17,62%
25	Pendapatan bagi hasil lainnya LO	8.1.2.3.2	716.850.000,00	1.670.630.000,00	(953.780.000,00)	(57,09%)
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 sd 25)		80.365.476.591,00	69.387.134.616,00	10.978.341.975,00	(15,82%)
27						
28	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 26)		726.839.358.425,00	828.331.190.822,00	(101.491.832.397,00)	(12,25%)
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO	8.1.3				
31	Pendapatan Hibah LO	8.1.3.1	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(36.757.731.544,58)	(96,22%)
32	Pendapatan Darurat LO		-	-		
33	Pendapatan Lainnya LO		-	-		
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 sd 33)		1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(36.757.731.544,58)	(96,22%)
35						
36	JUMLAH PENDAPATAN (6 + 28 + 34)		978.291.790.329,31	1.055.306.846.311,07	(77.015.055.981,76)	(7,28%)
37						

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
38	BEBAN					
39	BEBAN OPERASI	8.2.				
40	Beban Pegawai	8.2.1.	391.643.256.502,00	513.543.197.481,00	(121.899.940.979,00)	(23,74%)
41	Beban Persediaan		70.507.162.300,55	85.603.768.786,53	(15.096.606.485,98)	(17,64%)
42	Beban Jasa		153.929.093.775,92	129.560.302.450,48	24.368.791.325,44	14,61%
43	Beban Pemeliharaan		17.751.317.356,00	17.178.680.528,50	572.636.827,50	3,33%
44	Beban Perjalanan Dinas		43.662.419.274,00	43.521.015.103,00	141.404.171,00	0,32%
45	Beban Bunga		-	-	-	
46	Beban Subsidi		-	-	-	
47	Beban Hibah	8.2.3.	11.924.689.389,31	7.013.671.600,00	4.911.017.789,31	70,02%
48	Beban Bantuan Sosial	8.2.4.	14.984.656.810,00	8.957.848.417,00	6.026.808.393,00	67,28%
49	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	
50	Beban Penyisihan Piutang	8.2.5.	1.077.700.660,19	790.958.645,78	286.742.014,41	36,25%
51	Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	8.2.8.	-	172.622.427,05	(172.622.427,05)	00,00%
52	Beban Penyusutan	8.2.7.	101.506.978.370,00	91.165.184.133,88	10.341.794.236,12	11,34%
53	Beban Amortisasi	8.2.8.	2.037.673.624,99	2.076.171.277,33	(38.497.652,34)	(1,85%)
54	Beban Lain lain		5.891.346.381,67	8.765.424.021,96	(2.874.077.640,29)	(32,79%)
55	Jumlah Beban Operasi (40 sd 54)		814.916.294.444,63	908.348.844.872,51	(93.432.550.427,88)	(10,88%)
56						
57	SURLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (36 - 55)		163.375.495.884,68	146.958.001.438,56	16.417.494.446,12	(15,02%)
58						
59	SURLUS (DEFISIT) DARI					
60	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
61	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	
62	Surplus Penyelesaian Jangka Panjang		-	-	-	
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
65	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg Non Operasional (61 sd 64)		-	-	-	
66						
67	SURLUS (DEFISIT) SEBELUM LUAR BIASA (57 + 65)		163.375.495.884,68	146.958.001.438,56	16.417.494.446,12	(15,02%)
68						
69	POS LUAR BIASA					
70	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	
71	Beban Luar Biasa		94.394.268.663,99	-	94.394.268.663,99	00,00%
72	Beban Tidak Terduga		-	-	-	
73	Jumlah Pos Luar Biasa (71 sd 73)		(94.394.268.663,99)	-	(94.394.268.663,99)	00,00%
74						
75	SURPLUS/ DEFISIT LO (67 + 73)		68.981.227.220,69	146.958.001.438,56	16.417.494.446,12	(49,21%)

WALIKOTA MADIUN,

TTD

H. SUGENG RISMIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1	Ekuitas Awal	10.1	2.351.321.386.078,12	1.783.390.753.070,32
2	Surplus (Defisit) LO	10.2	68.981.227.220,69	146.958.001.438,56
3	Dampak Kumulatif Perubahan	10.3		
4	Akumulasi Penyusutan sd tahun 2016	10.4	-	-
5	Akumulasi Amortisasi sd tahun 2016	10.5	-	-
6	Lain-lain	10.6	(32.459.140.127,30)	420.972.631.569,24
7	Ekuitas Akhir	10.7	2.387.843.473.171,51	2.351.321.386.078,12

WALIKOTA MADIUN,

TTD

H. SUGENG RISMIYANTO

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2017 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ringkasan

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2017 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2017

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD 2017

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2017.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2017.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2017.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Bab VII Penjelasan Pos-Pos Neraca

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

Bab IX Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

Bab X Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab XI Informasi Non Keuangan

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2017 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun mencerminkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2017 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial
7. Urusan Tenaga Kerja
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Urusan Pangan
10. Urusan Pertanahan
11. Urusan Lingkungan Hidup
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Urusan Perhubungan
15. Urusan Komunikasi dan Informatika
16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Urusan Penanaman Modal
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
19. Urusan Statistik
20. Urusan Persandian
21. Urusan Kebudayaan

22. Urusan Perpustakaan
23. Urusan Kearsipan

3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Kehutanan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Urusan Perdagangan
7. Urusan Perindustrian
8. Urusan Transmigrasi

3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.



KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

- (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas, dan Kantor. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI

- (04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
- (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.
- (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- (08) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN

- (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.

- (11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (12) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.
- (13) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (14) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (15) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (16) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 meliputi:
 - (17) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan
 - (18) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 - (19) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - (20) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca
 - (21) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional
 - (22) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
 - (23) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas
 - (24) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan
 - (25) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan
 - (26) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban
 - (27) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset
 - (28) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban
 - (29) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
 - (30) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.



PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	192.013.251.000,00	230.608.717.369,14	120,10%	173.235.929.827,80

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2017, terealisasi sebesar Rp230.608.717.369,14 atau mencapai 120,10% yang berarti Rp38.600.089.462,23 atau 20,10% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp192.013.251.000,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2017 sebesar Rp230.613.340.462,23 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp173.235.929.827,80 terjadi kenaikan sebesar Rp57.372.787.541,34 atau 33,12%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	58.000.000.000,00	75.224.831.585,44	129,70%	64.045.559.079,36
Retribusi Daerah	15.963.010.000,00	18.407.218.016,50	115,31%	16.762.538.293,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.093.398.000,00	13.320.249.415,39	110,14%	11.172.031.994,51
Lain-lain PAD yang sah	105.956.843.000,00	123.656.418.351,81	116,70%	81.255.800.460,93
Total	192.013.251.000,00	230.608.717.369,14	120,10%	173.235.929.827,80

5.2. BELANJA

5.2.1. BELANJA OPERASI

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	473.918.184.690,00	391.631.558.502,00	82,64%	511.243.214.266,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp391.631.558.502,00 atau 82,64% yang berarti Rp82.286.626.188,00 atau 17,36% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp473.918.184.690,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2016 terjadi penurunan sebesar Rp119.611.655.764,00 atau sebesar 23,39 %.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Tdk Langsung	410.042.049.000,00	334.822.576.837,00	81,65%	457.736.983.096,00
2. Langsung	50.281.317.000,00	44.604.337.114,00	88,72%	45.571.655.700,00
3. BLUD	10.852.198.690,00	9.794.401.651,00	89,57%	7.934.575.470,00
4. BOS	2.742.620.000,00	2.410.242.900,00	87,17%	0,00
Total	473.918.184.690,00	391.631.558.502,00	82,64%	511.243.214.266,00

Terhitung mulai tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perbandingan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 beberapa SKPD tidak dapat diperbandingkan secara langsung sehingga disajikan kembali beberapa SKPD sesuai struktur organisasi pada tahun anggaran 2016.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai Per SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	228.650.680.000,00	190.667.725.306,00	83,39%	309.888.670.825,00
Dinas Kesehatan KB	32.830.566.690,00	29.478.458.362,00	89,79%	25.854.939.831,00
RSUD	19.868.687.000,00	18.121.145.987,00	91,20%	17.058.483.673,00



PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

6.1. SAL Awal

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal 1 Januari	305.857.486.594,13	339.135.179.352,77

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari tahun 2017 dan pada tanggal 1 Januari 2016.

6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	305.857.486.594,13	339.139.349.352,77

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan	308.490.756.889,46	305.857.486.594,13



PENJELASAN POS-POS NERACA

7.1. ASET

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset	2.398.412.871.680,95	2.383.862.311.722,37

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Apabila dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp14.550.579.958,58.

Perincian aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset lancar	364.592.855.334,30	358.332.225.827,03
Investasi	143.177.019.700,89	145.062.240.037,43
Aset Tetap	1.791.556.948.946,70	1.821.997.338.661,75
Aset Lainnya	99.086.047.699,06	58.470.507.196,17
Total	2.398.412.871.680,95	2.383.862.311.722,37

7.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Lancar	364.592.854.980,30	358.332.225.827,03

Jumlah aset lancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Apabila dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp6.260.629.507,28.

7.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Tetap	1.791.556.948.946,70	1.821.997.338.661,75

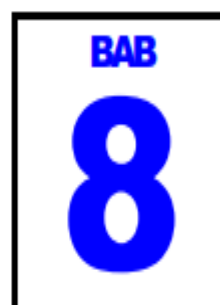
Jumlah aset tetap merupakan aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset Tetap	Tahun 2017	Tahun 2016
1. Tanah	706.768.917.129,00	746.929.754.829,00
2. Peralatan dan mesin	425.595.976.323,50	392.197.738.239,97
3. Gedung dan bangunan	647.411.660.877,03	715.435.055.660,95
4. Jalan, irigasi dan jaringan	800.578.583.757,05	705.169.609.291,00
5. Aset tetap lainnya	4.806.741.593,18	4.770.699.355,85
6. Konstruksi dalam pengerjaan	48.322.382.857,00	45.425.929.857,00
Aset Tetap	2.633.484.262.536,76	2.609.928.787.233,77
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(841.927.313.590,06)	(787.931.448.572,02)
Jumlah Aset Tetap Netto	1.791.556.948.946,70	1.821.997.338.661,75

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun menerapkan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset tetap. Sedangkan aset tetap lainnya tidak disusutkan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.



PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8.1. PENDAPATAN LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan LO	978.291.790.329,31	1.055.306.846.311,07	(7,30%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pendapatan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan LO terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer LO dan lain-lain pendapatan yang sah LO. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 7,30%.

Perincian pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	250.007.024.927,89	188.772.516.968,07	32,44%
Pendapatan Transfer LO	726.839.358.425,00	828.331.190.822,00	(12,25%)
Lain-lain Pendapatan yang sah LO	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(96,22%)
Jumlah	978.291.790.329,31	1.055.306.846.311,07	(7,30%)

8.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	250.007.024.927,89	188.772.516.968,07	32,44%

8.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	$4 = (2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Operasi	814.916.294.444,63	908.348.844.872,51	(10,29%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi beban yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Beban operasi merupakan beban yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain. Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar (10,29%).

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Operasi	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	$4 = (2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Beban pegawai	391.643.256.502,00	513.543.197.481,00	(23,74%)
2. Beban persediaan	70.507.162.300,55	85.603.768.786,53	(17,37%)
3. Beban jasa	153.929.093.775,92	129.560.302.450,48	14,61%
4. Beban pemeliharaan	17.751.317.356,00	17.178.680.528,50	3,33%
5. Beban perjalanan dinas	43.662.419.274,00	43.521.015.103,00	0,32%
6. Beban bunga	0,00	0,00	0,00%
7. Beban subsidi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban hibah	11.924.689.389,31	7.013.671.600,00	70,02%
9. Beban bantuan sosial	14.984.656.810,00	8.957.848.417,00	67,28%
10. Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%
11. Beban Penyisihan Piutang	1.077.700.660,19	790.958.645,78	36,25%
12. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	0,00	172.622.427,05	00,00%
13. Beban Penyusutan	101.506.978.370,00	91.165.184.133,00	11,34%
14. Beban Amortisasi	2.037.673.624,99	2.076.171.277,33	(1,85%)
15. Beban Lain-Lain	5.891.346.381,67	8.765.424.021,97	(32,79)%
Jumlah	814.916.294.444,63	908.348.844.872,51	(10,29%)



PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

9.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

9.1.1. ARUS KAS MASUK

9.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Penerimaan Pajak Daerah	75.224.831.585,44	64.045.559.079,36

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Daerah	Penerimaan 2017	Penerimaan 2016
1	2	3
1. Pajak hotel	4.974.716.454,00	3.997.471.040,00
2. Pajak restoran	7.184.100.061,77	5.564.700.875,66
3. Pajak hiburan	1.303.023.863,00	1.197.021.728,00
4. Pajak reklame	2.774.982.703,00	2.629.612.677,50
5. Pajak penerangan jalan	18.503.214.981,13	16.443.170.206,10
6. Pajak parkir	1.349.788.267,00	935.730.053,00
7. Pajak air tanah	302.830.125,54	299.662.989,00



PENJELASAN POS-POS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

10.1. Ekuitas Awal

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas awal	2.351.321.386.078,12	1.783.390.753.070,32

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016.

10.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Surplus (Defisit) LO	68.981.227.220,69	146.958.001.438,56

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

10.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan akuntansi yang



INFORMASI NON KEUANGAN

11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN

11.1.1 Keadaan Geografis

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km² dan terletak pada koordinat 111^o sampai 112^o Bujur Timur dan 7^o sampai 8^o Lintang Selatan, yang secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

11.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun tahun 2012 mencapai 172.421 jiwa terdiri atas 83.192 penduduk laki-laki dan 89.229 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km² di Kota Madiun sebesar 5.189 jiwa/km².

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 73.286 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km², sehingga kepadatannya 5.882 penduduk/km².

